



**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR M.HH-04.TI.06.02 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PENETAPAN ANGGOTA  
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM NASIONAL YANG TERINTEGRASI  
DENGAN PORTAL *JDIHN.GO.ID* TAHUN 2020**

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk mengelola dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap, akurat, mudah dan cepat yang tersebar di berbagai instansi pemerintah dan institusi lainnya, perlu membangun kerja sama dalam suatu jaringan dokumentasi dan informasi hukum nasional yang terpadu dan terintegrasi melalui portal *jdihn.go.id* sebagai pusat data dokumentasi dan informasi hukum nasional;
- b. bahwa upaya pengintegrasian *database* anggota jaringan membutuhkan sebuah daya upaya yang sungguh-sungguh dan kerja sama yang baik dengan anggota jaringan sehingga perlu memberikan penghargaan bagi Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional yang telah mengintegrasikan *database* dokumen hukum dengan Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang Penetapan Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional yang Terintegrasi dengan Portal *jdihn.go.id* Tahun 2020;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG PENETAPAN ANGGOTA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM NASIONAL YANG TERINTEGRASI DENGAN PORTAL *JDIHN.GO.ID* TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional yang Terintegrasi dengan Portal *jdihn.go.id* Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Memberikan piagam penghargaan kepada Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional yang Terintegrasi dengan Portal *jdihn.go.id* Tahun 2020.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan seperlunya.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada setiap penerima penghargaan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 15 Oktober 2020

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,



YASONNA H. LAOLY

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Para Menteri Kabinet Kerja;
3. Para Pimpinan Lembaga Negara;
4. Para Pimpinan Lembaga Pemerintahan Non-Kementerian;
5. Gubernur seluruh Indonesia;
6. Bupati seluruh Indonesia;
7. Walikota seluruh Indonesia;
8. Pimpinan Unit Eselon I di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM RI;
9. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM seluruh Indonesia;
10. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG PENETAPAN ANGGOTA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM NASIONAL YANG TERINTEGRASI DENGAN PORTAL *JDIHN.GO.ID* TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional yang Terintegrasi dengan Portal *jdihn.go.id* Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

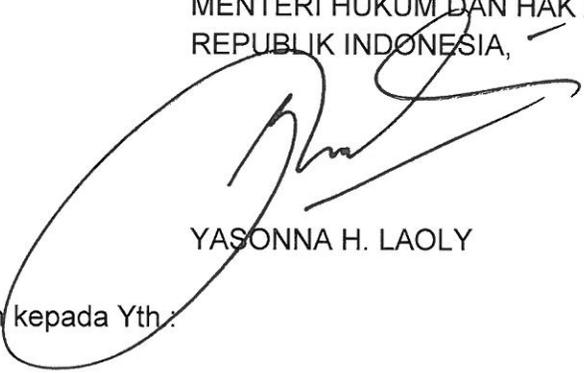
KEDUA : Memberikan piagam penghargaan kepada Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional yang Terintegrasi dengan Portal *jdihn.go.id* Tahun 2020.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan seperlunya.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada setiap penerima penghargaan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 15 Oktober 2020

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,



YASONNA H. LAOLY

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Para Menteri Kabinet Kerja;
3. Para Pimpinan Lembaga Negara;
4. Para Pimpinan Lembaga Pemerintahan Non-Kementerian;
5. Gubernur seluruh Indonesia;
6. Bupati seluruh Indonesia;
7. Walikota seluruh Indonesia;
8. Pimpinan Unit Eselon I di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM RI;
9. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM seluruh Indonesia;
10. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAM RI  
NOMOR : M.HH-04.TI.06.02 TAHUN 2020  
TANGGAL : 15 Oktober 2020

**DAFTAR PENETAPAN ANGGOTA  
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM NASIONAL YANG TERINTEGRASI  
DENGAN PORTAL *JDIHN.GO.ID* TAHUN 2020**

<b>NO.</b>	<b>ANGGOTA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM</b>	<b>TINGKAT</b>	<b>KETERANGAN</b>
1	Kementerian Agama Republik Indonesia	Kementerian	Pusat
2	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia	Kementerian	Pusat
3	Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia	Kementerian	Pusat
4	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia	Kementerian	Pusat
5	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia	Kementerian	Pusat
6	Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia	Kementerian	Pusat
7	Kementerian Kesehatan Republik Indonesia	Kementerian	Pusat
8	Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia	Kementerian	Pusat
9	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia	Kementerian	Pusat
10	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia	Kementerian	Pusat
11	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia	Kementerian	Pusat
12	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia	Kementerian	Pusat
13	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia	Kementerian	Pusat
14	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia	Kementerian	Pusat
15	Kementerian Perhubungan Republik Indonesia	Kementerian	Pusat
16	Kementerian Perindustrian Republik Indonesia	Kementerian	Pusat
17	Kementerian Pertahanan Republik Indonesia	Kementerian	Pusat
18	Kementerian Pertanian Republik Indonesia	Kementerian	Pusat

19	Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional Republik Indonesia	Kementerian	Pusat
20	Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia	Kementerian	Pusat
21	Kementerian Sosial Republik Indonesia	Kementerian	Pusat
22	Komisi Pemberantasan Korupsi	Lembaga Negara	Pusat
23	Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia	Lembaga Negara	Pusat
24	Ombudsman Republik Indonesia	Lembaga Negara	Pusat
25	Badan Pembinaan Ideologi Pancasila	Lembaga Non Struktural	Pusat
26	Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Republik Indonesia	Lembaga Non Struktural	Pusat
27	Badan Pengawas Pemilihan Umum	Lembaga Non Struktural	Pusat
28	Badan Pengembangan Wilayah Surabaya - Madura	Lembaga Non Struktural	Pusat
29	Komisi Aparatur Sipil Negara	Lembaga Non Struktural	Pusat
30	Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban	Lembaga Non Struktural	Pusat
31	Arsip Nasional Republik Indonesia	LPNK	Pusat
32	Badan Ekonomi Kreatif	LPNK	Pusat
33	Badan Intelijen Negara	LPNK	Pusat
34	Badan Nasional Penanggulangan Terorisme	LPNK	Pusat
35	Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BASARNAS)	LPNK	Pusat
36	Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan	LPNK	Pusat
37	Badan Pengawas Obat dan Makanan	LPNK	Pusat
38	Badan Siber dan Sandi Negara	LPNK	Pusat
39	Badan Standardisasi Nasional	LPNK	Pusat
40	Lembaga Administrasi Negara	LPNK	Pusat
41	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	LPNK	Pusat

42	Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional	LPNK	Pusat
43	Perpustakaan Nasional	LPNK	Pusat
44	Radio Republik Indonesia	LPNK	Pusat
45	Provinsi Banten	Provinsi	Banten
46	Provinsi D.I. Yogyakarta	Provinsi	D.I. Yogyakarta
47	Provinsi Gorontalo	Provinsi	Gorontalo
48	Provinsi Jambi	Provinsi	Jambi
49	Provinsi Kalimantan Tengah	Provinsi	Kalimantan Tengah
50	Provinsi Kalimantan Utara	Provinsi	Kalimantan Utara
51	Provinsi Papua Barat	Provinsi	Papua Barat
52	Provinsi Sulawesi Selatan	Provinsi	Sulawesi Selatan
53	Provinsi Sulawesi Utara	Provinsi	Sulawesi Utara
54	Provinsi Sumatera Selatan	Provinsi	Sumatera Selatan
55	Provinsi Sumatera Utara	Provinsi	Sumatera Utara
56	Kabupaten Aceh Besar	Kabupaten	Aceh
57	Kabupaten Aceh Jaya	Kabupaten	Aceh
58	Kabupaten Aceh Tamiang	Kabupaten	Aceh
59	Kabupaten Aceh Tengah	Kabupaten	Aceh
60	Kabupaten Aceh Utara	Kabupaten	Aceh
61	Kabupaten Bandung Barat	Kabupaten	Jawa Barat
62	Kabupaten Bangka Tengah	Kabupaten	Kepulauan Bangka Belitung
63	Kabupaten Bangkalan	Kabupaten	Jawa Timur
64	Kabupaten Banjar	Kabupaten	Kalimantan Selatan
65	Kabupaten Bantaeng	Kabupaten	Sulawesi Selatan
66	Kabupaten Banyumas	Kabupaten	Jawa Tengah
67	Kabupaten Barito Kuala	Kabupaten	Kalimantan Selatan

68	Kabupaten Barito Selatan	Kabupaten	Kalimantan Tengah
69	Kabupaten Barito Utara	Kabupaten	Kalimantan Tengah
70	Kabupaten Barru	Kabupaten	Sulawesi Selatan
71	Kabupaten Batanghari	Kabupaten	Jambi
72	Kabupaten Bengkalis	Kabupaten	Riau
73	Kabupaten Bengkulu Tengah	Kabupaten	Bengkulu
74	Kabupaten Bima	Kabupaten	Nusa Tenggara Barat
75	Kabupaten Blitar	Kabupaten	Jawa Timur
76	Kabupaten Bojonegoro	Kabupaten	Jawa Timur
77	Kabupaten Bolaang Mongondow	Kabupaten	Sulawesi Utara
78	Kabupaten Bolaang Mongondow Timur	Kabupaten	Sulawesi Utara
79	Kabupaten Bondowoso	Kabupaten	Jawa Timur
80	Kabupaten Bulukumba	Kabupaten	Sulawesi Selatan
81	Kabupaten Bungo	Kabupaten	Jambi
82	Kabupaten Ciamis	Kabupaten	Jawa Barat
83	Kabupaten Cirebon	Kabupaten	Jawa Barat
84	Kabupaten Gorontalo	Kabupaten	Gorontalo
85	Kabupaten Gorontalo Utara	Kabupaten	Gorontalo
86	Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Kabupaten	Kalimantan Selatan
87	Kabupaten Hulu Sungai Tengah	Kabupaten	Kalimantan Selatan
88	Kabupaten Hulu Sungai Utara	Kabupaten	Kalimantan Selatan
89	Kabupaten Indramayu	Kabupaten	Jawa Barat
90	Kabupaten Jember	Kabupaten	Jawa Timur
91	Kabupaten Jombang	Kabupaten	Jawa Timur
92	Kabupaten Karawang	Kabupaten	Jawa Barat
93	Kabupaten Kayong Utara	Kabupaten	Kalimantan Barat

94	Kabupaten Kebumen	Kabupaten	Jawa Tengah
95	Kabupaten Kediri	Kabupaten	Jawa Timur
96	Kabupaten Kepulauan Anambas	Kabupaten	Kepulauan Riau
97	Kabupaten Kepulauan Aru	Kabupaten	Maluku
98	Kabupaten Kolaka	Kabupaten	Sulawesi Tenggara
99	Kabupaten Kotabaru	Kabupaten	Kalimantan Selatan
100	Kabupaten Kotawaringin Barat	Kabupaten	Kalimantan Tengah
101	Kabupaten Kuantan Singingi	Kabupaten	Riau
102	Kabupaten Kutai Barat	Kabupaten	Kalimantan Timur
103	Kabupaten Labuhanbatu Selatan	Kabupaten	Sumatera Utara
104	Kabupaten Labuhanbatu Utara	Kabupaten	Sumatera Utara
105	Kabupaten Lamandau	Kabupaten	Kalimantan Tengah
106	Kabupaten Lamongan	Kabupaten	Jawa Timur
107	Kabupaten Lampung Barat	Kabupaten	Lampung
108	Kabupaten Lampung Selatan	Kabupaten	Lampung
109	Kabupaten Lampung Timur	Kabupaten	Lampung
110	Kabupaten Lampung Utara	Kabupaten	Lampung
111	Kabupaten Langkat	Kabupaten	Sumatera Utara
112	Kabupaten Lombok Barat	Kabupaten	Nusa Tenggara Barat
113	Kabupaten Madiun	Kabupaten	Jawa Timur
114	Kabupaten Magetan	Kabupaten	Jawa Timur
115	Kabupaten Mahakam Ulu	Kabupaten	Kalimantan Timur
116	Kabupaten Majalengka	Kabupaten	Jawa Barat
117	Kabupaten Malang	Kabupaten	Jawa Timur
118	Kabupaten Mamasa	Kabupaten	Sulawesi Barat
119	Kabupaten Maros	Kabupaten	Sulawesi Selatan

120	Kabupaten Mimika	Kabupaten	Papua
121	Kabupaten Minahasa Tenggara	Kabupaten	Sulawesi Utara
122	Kabupaten Mojokerto	Kabupaten	Jawa Timur
123	Kabupaten Murung Raya	Kabupaten	Kalimantan Tengah
124	Kabupaten Musi Banyuasin	Kabupaten	Sumatera Selatan
125	Kabupaten Musi Rawas	Kabupaten	Sumatera Selatan
126	Kabupaten Natuna	Kabupaten	Kepulauan Riau
127	Kabupaten Nganjuk	Kabupaten	Jawa Timur
128	Kabupaten Ngawi	Kabupaten	Jawa Timur
129	Kabupaten Nunukan	Kabupaten	Kalimantan Utara
130	Kabupaten Ogan Komering Ulu	Kabupaten	Sumatera Selatan
131	Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan	Kabupaten	Sumatera Selatan
132	Kabupaten Pacitan	Kabupaten	Jawa Timur
133	Kabupaten Pamekasan	Kabupaten	Jawa Timur
134	Kabupaten Pangandaran	Kabupaten	Jawa Barat
135	Kabupaten Pangkajene Kepulauan	Kabupaten	Sulawesi Selatan
136	Kabupaten Pasangkayu	Kabupaten	Sulawesi Barat
137	Kabupaten Pasuruan	Kabupaten	Jawa Timur
138	Kabupaten Penajam Paser Utara	Kabupaten	Kalimantan Timur
139	Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir	Kabupaten	Sumatera Selatan
140	Kabupaten Pesisir Barat	Kabupaten	Lampung
141	Kabupaten Pidie Jaya	Kabupaten	Aceh
142	Kabupaten Ponorogo	Kabupaten	Jawa Timur
143	Kabupaten Probolinggo	Kabupaten	Jawa Timur
144	Kabupaten Pulang Pisau	Kabupaten	Kalimantan Tengah
145	Kabupaten Purworejo	Kabupaten	Jawa Tengah

146	Kabupaten Sambas	Kabupaten	Kalimantan Barat
147	Kabupaten Sampang	Kabupaten	Jawa Timur
148	Kabupaten Seruyan	Kabupaten	Kalimantan Tengah
149	Kabupaten Sidenreng Rappang	Kabupaten	Sulawesi Selatan
150	Kabupaten Sidoarjo	Kabupaten	Jawa Timur
151	Kabupaten Simalungun	Kabupaten	Sumatera Utara
152	Kabupaten Simeulue	Kabupaten	Aceh
153	Kabupaten Sinjai	Kabupaten	Sulawesi Selatan
154	Kabupaten Situbondo	Kabupaten	Jawa Timur
155	Kabupaten Solok	Kabupaten	Sumatera Barat
156	Kabupaten Subang	Kabupaten	Jawa Barat
157	Kabupaten Sumbawa	Kabupaten	Nusa Tenggara Barat
158	Kabupaten Sumbawa Barat	Kabupaten	Nusa Tenggara Barat
159	Kabupaten Sumenep	Kabupaten	Jawa Timur
160	Kabupaten Takalar	Kabupaten	Sulawesi Selatan
161	Kabupaten Tanah Bumbu	Kabupaten	Kalimantan Selatan
162	Kabupaten Tanah Laut	Kabupaten	Kalimantan Selatan
163	Kabupaten Tanggamus	Kabupaten	Lampung
164	Kabupaten Tapanuli Utara	Kabupaten	Sumatera Utara
165	Kabupaten Tasikmalaya	Kabupaten	Jawa Barat
166	Kabupaten Tebo	Kabupaten	Jambi
167	Kabupaten Timor Tengah Selatan	Kabupaten	Nusa Tenggara Timur
168	Kabupaten Toraja Utara	Kabupaten	Sulawesi Selatan
169	Kabupaten Trenggalek	Kabupaten	Jawa Timur
170	Kabupaten Tulang Bawang	Kabupaten	Lampung
171	Kabupaten Tulungagung	Kabupaten	Jawa Timur

172	Kabupaten Wajo	Kabupaten	Sulawesi Selatan
173	Kota Bandar Lampung	Kota	Lampung
174	Kota Banjar	Kota	Jawa Barat
175	Kota Batu	Kota	Jawa Timur
176	Kota Bau Bau	Kota	Sulawesi Tenggara
177	Kota Bengkulu	Kota	Bengkulu
178	Kota Bima	Kota	Nusa Tenggara Barat
179	Kota Blitar	Kota	Jawa Timur
180	Kota Bukittinggi	Kota	Sumatera Barat
181	Kota Cilegon	Kota	Banten
182	Kota Gorontalo	Kota	Gorontalo
183	Kota Gunungsitoli	Kota	Sumatera Utara
184	Kota Jambi	Kota	Jambi
185	Kota Kediri	Kota	Jawa Timur
186	Kota Kendari	Kota	Sulawesi Tenggara
187	Kota Lhokseumawe	Kota	Aceh
188	Kota Madiun	Kota	Jawa Timur
189	Kota Magelang	Kota	Jawa Tengah
190	Kota Mataram	Kota	Nusa Tenggara Barat
191	Kota Mojokerto	Kota	Jawa Timur
192	Kota Palangkaraya	Kota	Kalimantan Tengah
193	Kota Pariaman	Kota	Sumatera Barat
194	Kota Pasuruan	Kota	Jawa Timur
195	Kota Payakumbuh	Kota	Sumatera Barat
196	Kota Prabumulih	Kota	Sumatera Selatan
197	Kota Probolinggo	Kota	Jawa Timur

198	Kota Sungai Penuh	Kota	Jambi
199	Kota Surabaya	Kota	Jawa Timur
200	Kota Tebing Tinggi	Kota	Sumatera Utara
201	DPRD Provinsi Bali	DPRD Provinsi	Bali
202	DPRD Provinsi D.I. Yogyakarta	DPRD Provinsi	D.I. Yogyakarta
203	DPRD Provinsi Jawa Barat	DPRD Provinsi	Jawa Barat
204	DPRD Provinsi Jawa Timur	DPRD Provinsi	Jawa Timur
205	DPRD Provinsi Kalimantan Timur	DPRD Provinsi	Kalimantan Timur
206	DPRD Provinsi Lampung	DPRD Provinsi	Lampung
207	DPRD Provinsi Sulawesi Barat	DPRD Provinsi	Sulawesi Barat
208	DPRD Kabupaten Badung	DPRD Kabupaten	Bali
209	DPRD Kabupaten Bangka	DPRD Kabupaten	Kepulauan Bangka Belitung
210	DPRD Kabupaten Bangkalan	DPRD Kabupaten	Jawa Timur
211	DPRD Kabupaten Bangli	DPRD Kabupaten	Bali
212	DPRD Kabupaten Banyuwangi	DPRD Kabupaten	Jawa Timur
213	DPRD Kabupaten Batang	DPRD Kabupaten	Jawa Tengah
214	DPRD Kabupaten Belitung Timur	DPRD Kabupaten	Kepulauan Bangka Belitung
215	DPRD Kabupaten Bengkalis	DPRD Kabupaten	Riau
216	DPRD Kabupaten Bengkulu Utara	DPRD Kabupaten	Bengkulu
217	DPRD Kabupaten Bima	DPRD Kabupaten	Nusa Tenggara Barat
218	DPRD Kabupaten Bintan	DPRD Kabupaten	Kepulauan Riau
219	DPRD Kabupaten Blitar	DPRD Kabupaten	Jawa Timur
220	DPRD Kabupaten Bojonegoro	DPRD Kabupaten	Jawa Timur
221	DPRD Kabupaten Bondowoso	DPRD Kabupaten	Jawa Timur
222	DPRD Kabupaten Boyolali	DPRD Kabupaten	Jawa Tengah
223	DPRD Kabupaten Buleleng	DPRD Kabupaten	Bali

224	DPRD Kabupaten Bulukumba	DPRD Kabupaten	Sulawesi Selatan
225	DPRD Kabupaten Cianjur	DPRD Kabupaten	Jawa Barat
226	DPRD Kabupaten Dharmasraya	DPRD Kabupaten	Sumatera Barat
227	DPRD Kabupaten Garut	DPRD Kabupaten	Jawa Barat
228	DPRD Kabupaten Gianyar	DPRD Kabupaten	Bali
229	DPRD Kabupaten Gresik	DPRD Kabupaten	Jawa Timur
230	DPRD Kabupaten Hulu Sungai Utara	DPRD Kabupaten	Kalimantan Selatan
231	DPRD Kabupaten Jember	DPRD Kabupaten	Jawa Timur
232	DPRD Kabupaten Jembrana	DPRD Kabupaten	Bali
233	DPRD Kabupaten Jepara	DPRD Kabupaten	Jawa Tengah
234	DPRD Kabupaten Jombang	DPRD Kabupaten	Jawa Timur
235	DPRD Kabupaten Karangasem	DPRD Kabupaten	Bali
236	DPRD Kabupaten Kediri	DPRD Kabupaten	Jawa Timur
237	DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas	DPRD Kabupaten	Kepulauan Riau
238	DPRD Kabupaten Klungkung	DPRD Kabupaten	Bali
239	DPRD Kabupaten Kotabaru	DPRD Kabupaten	Kalimantan Selatan
240	DPRD Kabupaten Lamongan	DPRD Kabupaten	Jawa Timur
241	DPRD Kabupaten Lampung Barat	DPRD Kabupaten	Lampung
242	DPRD Kabupaten Lingga	DPRD Kabupaten	Kepulauan Riau
243	DPRD Kabupaten Lumajang	DPRD Kabupaten	Jawa Timur
244	DPRD Kabupaten Madiun	DPRD Kabupaten	Jawa Timur
245	DPRD Kabupaten Magetan	DPRD Kabupaten	Jawa Timur
246	DPRD Kabupaten Malang	DPRD Kabupaten	Jawa Timur
247	DPRD Kabupaten Mojokerto	DPRD Kabupaten	Jawa Timur
248	DPRD Kabupaten Murung Raya	DPRD Kabupaten	Kalimantan Tengah
249	DPRD Kabupaten Nganjuk	DPRD Kabupaten	Jawa Timur

250	DPRD Kabupaten Ngawi	DPRD Kabupaten	Jawa Timur
251	DPRD Kabupaten Pacitan	DPRD Kabupaten	Jawa Timur
252	DPRD Kabupaten Pamekasan	DPRD Kabupaten	Jawa Timur
253	DPRD Kabupaten Pangandaran	DPRD Kabupaten	Jawa Barat
254	DPRD Kabupaten Pangkajene Kepulauan	DPRD Kabupaten	Sulawesi Selatan
255	DPRD Kabupaten Pasuruan	DPRD Kabupaten	Jawa Timur
256	DPRD Kabupaten Pati	DPRD Kabupaten	Jawa Tengah
257	DPRD Kabupaten Ponorogo	DPRD Kabupaten	Jawa Timur
258	DPRD Kabupaten Probolinggo	DPRD Kabupaten	Jawa Timur
259	DPRD Kabupaten Sampang	DPRD Kabupaten	Jawa Timur
260	DPRD Kabupaten Sidoarjo	DPRD Kabupaten	Jawa Timur
261	DPRD Kabupaten Situbondo	DPRD Kabupaten	Jawa Timur
262	DPRD Kabupaten Sumenep	DPRD Kabupaten	Jawa Timur
263	DPRD Kabupaten Tabalong	DPRD Kabupaten	Kalimantan Selatan
264	DPRD Kabupaten Tabanan	DPRD Kabupaten	Bali
265	DPRD Kabupaten Tanah Bumbu	DPRD Kabupaten	Kalimantan Selatan
266	DPRD Kabupaten Trenggalek	DPRD Kabupaten	Jawa Timur
267	DPRD Kabupaten Tuban	DPRD Kabupaten	Jawa Timur
268	DPRD Kabupaten Tulungagung	DPRD Kabupaten	Jawa Timur
269	DPRD Kabupaten Wonosobo	DPRD Kabupaten	Jawa Tengah
270	DPRD Kota Banjarmasin	DPRD Kota	Kalimantan Selatan
271	DPRD Kota Batam	DPRD Kota	Kepulauan Riau
272	DPRD Kota Batu	DPRD Kota	Jawa Timur
273	DPRD Kota Blitar	DPRD Kota	Jawa Timur
274	DPRD Kota Denpasar	DPRD Kota	Bali
275	DPRD Kota Dumai	DPRD Kota	Riau

276	DPRD Kota Kediri	DPRD Kota	Jawa Timur
277	DPRD Kota Madiun	DPRD Kota	Jawa Timur
278	DPRD Kota Malang	DPRD Kota	Jawa Timur
279	DPRD Kota Metro	DPRD Kota	Lampung
280	DPRD Kota Mojokerto	DPRD Kota	Jawa Timur
281	DPRD Kota Palangkaraya	DPRD Kota	Kalimantan Tengah
282	DPRD Kota Pasuruan	DPRD Kota	Jawa Timur
283	DPRD Kota Probolinggo	DPRD Kota	Jawa Timur
284	DPRD Kota Surabaya	DPRD Kota	Jawa Timur
285	Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Tambun Bungai	Perpustakaan Hukum	Kalimantan Tengah
286	Universitas Bandar Lampung	Perpustakaan Hukum	Lampung
287	Universitas Lampung	Perpustakaan Hukum	Lampung
288	Universitas Muhammadiyah Metro	Perpustakaan Hukum	Lampung
289	Universitas Sam Ratulangi	Perpustakaan Hukum	Sulawesi Utara
290	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia	Unit Eselon I KemenkumHAM	
291	Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual	Unit Eselon I KemenkumHAM	
292	Direktorat Jenderal Imigrasi	Unit Eselon I KemenkumHAM	
293	Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan	Unit Eselon I KemenkumHAM	
294	Inspektorat Jenderal	Unit Eselon I KemenkumHAM	
295	Sekretariat Jenderal	Unit Eselon I KemenkumHAM	

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,  
  
YASONNA H. LAOLY

276	DPRD Kota Kediri	DPRD Kota	Jawa Timur
277	DPRD Kota Madiun	DPRD Kota	Jawa Timur
278	DPRD Kota Malang	DPRD Kota	Jawa Timur
279	DPRD Kota Metro	DPRD Kota	Lampung
280	DPRD Kota Mojokerto	DPRD Kota	Jawa Timur
281	DPRD Kota Palangkaraya	DPRD Kota	Kalimantan Tengah
282	DPRD Kota Pasuruan	DPRD Kota	Jawa Timur
283	DPRD Kota Probolinggo	DPRD Kota	Jawa Timur
284	DPRD Kota Surabaya	DPRD Kota	Jawa Timur
285	Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Tambun Bungai	Perpustakaan Hukum	Kalimantan Tengah
286	Universitas Bandar Lampung	Perpustakaan Hukum	Lampung
287	Universitas Lampung	Perpustakaan Hukum	Lampung
288	Universitas Muhammadiyah Metro	Perpustakaan Hukum	Lampung
289	Universitas Sam Ratulangi	Perpustakaan Hukum	Sulawesi Utara
290	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia	Unit Eselon I KemenkumHAM	
291	Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual	Unit Eselon I KemenkumHAM	
292	Direktorat Jenderal Imigrasi	Unit Eselon I KemenkumHAM	
293	Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan	Unit Eselon I KemenkumHAM	
294	Inspektorat Jenderal	Unit Eselon I KemenkumHAM	
295	Sekretariat Jenderal	Unit Eselon I KemenkumHAM	

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,



YASONNA H. LAOLY